

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah, PDRB ADHK, dan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh periode 2010–2023 menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teori klasik, di mana hasil uji stasioneritas dan model VAR serta uji kausalitas Granger memperlihatkan adanya hubungan satu arah dari PDRB ADHK terhadap pengeluaran pemerintah, namun pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK maupun tingkat kemiskinan dalam jangka pendek. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah lebih mendorong kenaikan belanja pemerintah, bukan sebaliknya, serta menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah dalam menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masih belum optimal. Secara empiris, kondisi ini dapat mencerminkan struktur belanja yang lebih dominan pada pengeluaran rutin dibandingkan belanja produktif yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kualitas dan komposisi belanja daerah agar lebih berorientasi pada sektor produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dalam jangka panjang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran yang dapat saya diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat,

seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

2. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan program pengentasan kemiskinan secara lebih terarah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat bersifat inklusif dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Diperlukan peningkatan akurasi perencanaan anggaran berbasis data sosial ekonomi yang aktual agar kebijakan pengeluaran pemerintah dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat pengangguran, investasi, indeks pembangunan manusia, atau ketimpangan pendapatan untuk memperoleh gambaran hubungan yang lebih komprehensif, serta menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar dinamika jangka panjang dapat terlihat dengan lebih jelas.

